

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	7
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita :Kabupaten Semarang

Halaman 4

Penyerapan APBD Baru 40 Persen

AMBARAWA - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambarawa, Raharjo Budi Kisananto mengungkapkan, penyerapan dana APBD Kabupaten Semarang Tahun 2017 masih sangat rendah. Pihaknya menekankan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Semarang agar meningkatkan penyerapan anggaran.

"Penyerapannya baru 40 persen itu memang sangat rendah sekali. Padahal pemerintahan Jokowi mengharapkan penyerapan anggaran minimal di atas 90 persen, sehingga kami selaku aparat penegak hukum menyatukan visi misi dengan bupati agar penyerapan anggaran di atas 90 persen. Kami memberikan stressing kepada OPD agar memanfaatkan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) dengan baik, jangan ada keraguan," ungkap Raharjo di sela 'Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Meningkatkan Penyerapan Anggaran Tahun 2017' kepada pimpinan OPD Pemkab Semarang di Kantor Kejari

Ambarawa, Selasa (29/8).

Menurut Raharjo, bila petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis (juklak juknis) kegiatan belum turun bisa melakukan diskresi. Tapi harus memenuhi prinsip asas umum pemerintahan yang baik tanpa ada kepentingan dan merugikan keuangan negara. "Jika diskresinya tidak memenuhinya unsur tersebut, penyelesaiannya ada UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kalau OPD ada kesulitan silakan konsultasi ke kita, sehingga jika ada mobil plat merah ke kejaksaan jangan dikonotasikan sedang diperiksa atau dimintai keterangan karena mereka konsultasi," ujarnya.

Raharjo mengatakan, pembertantasan tindak pidana korupsi

meliputi dua hal, yakni pencegahan dan penindakan. Salah satu pencegahannya adalah konsultasi. "Kita dorong OPD mempercepat penyerapan anggaran, syukur sistem e-governance sudah berjalan baik sehingga ke depan penyerapannya bisa maksimal," katanya.

■ Beberapa Kendala

Bupati Semarang dr Mundjirin mengakui penyerapan anggaran memang lambat karena ada beberapa kendala, di antaranya bantuan gubernur dan Kementerian yang belum dikerjakan. Contohnya, pembangunan Pasar Suruh senilai Rp 6 miliar tidak dilaksanakan karena DPRD Kabupaten Semarang tak menyetujui. "Ini jelas penyerapannya tidak bisa 100 persen. Belum lagi ada kegiatan lain yang tidak mungkin dilaksanakan, seperti Puskesmas Bringin yang merupakan bangunan purbakala tidak boleh dibongkar," jelasnya.

Bupati meminta pimpinan OPD tidak ragu-ragu untuk berkonsultasi ke TP4D dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal. "Kita maunya tiap tahun maju namun kendalanya banyak. Kita usahakan penye-

rapannya sampai 92 persen, mudah-mudahan maksimal," katanya.

Bupati menambahkan, adanya LSM yang mengancam atau mengintimidasi pengguna de-

ngan meminta sejumlah uang turut andil memperlambat penyerapan anggaran.

"Misalnya LSM sampai mengancam dan mengintimidasi meminta sumbangan segini,

akan saya ganggu kalau tidak menyumbang kan repot. Uangnya darimana, kalau minta sumbangan ya sukarela, jangan ngarani," tandasnya. ■

rbd/SR